

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2014, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Amrani, Hanafi, 2015, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, UII Press, Yogyakarta.
- Amrullah, Arif, 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*, cetakan kedua, Bayumedia Publishing, Malang.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rinneka Cipta, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta.
- Hadjon, Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Harkrisnowo, Harkristuti, 2003, *Kriminalisasi Pemutihan Uang: Tinjauan Terhadap UU No.15 tahun 2002, Proceedings-Kerjasama Pusat kajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, cet. I, Jakarta.*
- Harmadi, 2011, *Kejahatan Pencucian Uang*, Setara Press, Malang.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Husein, Yunus, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Jakarta.

- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, 2011, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Kristiana, Yudi, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Nico, 2003, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, CDSBL, Yogyakarta.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2009, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Grafiti, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, 2007, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tedjosaputro, Liliana, 1995, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Tobing, G.H.S Lumban 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PER)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).

Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5709).

C. Makalah/Tesis/Internet

Alfarouqi, Mujahid, “Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, http://www.academia.edu/19886714/Peranan_Pusat_Pelaporan_dan_Analisis_Transaksi_Keuangan_Ppatk_Dalam_Pemberantasan_Tindak_Pidana_Pencucian_Uang, diakses tanggal 5 Maret 2017.

Anonim, “Metodologi Penelitian Hukum Berdasarkan Sifatnya”, <https://idtesis.com/metodologi-penelitian-hukum-2/>, diakses tanggal 8 Maret 2017.

Anonim, “Narasumber”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Narasumber>, diakses tanggal 8 Maret 2017.

- Anonim, “Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan”, https://id.wikipedia.org/wiki/Pusat_Pelaporan_dan_Analisis_Transaksi_Keuangan, diakses tanggal 28 Februari 2017.
- Anonim, “Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, <http://jdih.ppatk.go.id>, diakses tanggal 23 Januari 2017.
- Bhakti, Indra, “Hak Mengundurkan Diri (Verschoningsrecht) Notaris Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015.
- Damayanti, Guslina, “Peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.
- Fathoni, Ahmad “Pengertian Penelitian Kuantitatif”, <http://www.academia.edu/8471530/Metode-Penelitian-Kuantitatif-Dan-Kualitatif>, diakses tanggal 8 Maret 2017.
- Financial Action Task Force*, “*The FATF Revised the 40 and the IX Recommendations*”, *The Revision of the FATF Recommendations was Adopted and Published in February*, 2012.
- Group, Egmont, “Financial Intelligence Unit the Belgium”, <http://www.ctif-cfi.be/website/index.php?option=comcontent&view=article&id=26&Itemid=41&lang=en>, diakses tanggal 29 Juli 2017.
- Group, Egmont, “Financial Intelligence Unit the Netherlands”, <https://www.fiunederland.nl/en/meldergroep/276>, diakses tanggal 29 Juli 2017.
- Group, Egmont, “Ministry of Finance Republic of Poland”, http://www.mf.gov.pl/en/ministry_offinance/amlctf/system/asset_publisher/9Mde/content/the_system_of_combating_money_launderingandterrorist_terrorist_financing?redirect, diakses tanggal 30 Juli 2017.
- Group, Egmont, “Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias”, <http://www.sepblac.es/ingles/regulations/regulations.htm>, diakses tanggal 30 Juli 2017.
- Hidayanti, Febby, “Pengertian serta Sejarah PPAT dan Notaris di Indonesia”, <https://www.notarisdanppat.com/pengertian-serta-sejarah-ppat-dan-notaris-di-indonesia/>, diakses tanggal 28 Februari 2017.

- Irwanto, Hartono Tasir “Dasar-Dasar Ilmu Hukum; Penelitian Hukum”, <http://www.kompasiana.com/tonton/dasar-dasar-ilmu-hukum-penelitian-hukum>, diakses tanggal 8 Maret 2017.
- Murjiyanto, Raden, “Kewajiban Notaris dalam Pembuatan Akta”, *Seminar Nasional Perlindungan Hukum Profesi Jabatan Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya*, Yogyakarta, 11 Februari, 2017.
- Noor, Hendry Julian, “Jasa Notaris Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Memperkuat Rezim Anti Pencucian Uang”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010.
- Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan “Regulasi Terbaru di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme”, http://www.ppatk.go.id/publikasi/read/17/regulasi_terbaru_di_bidang_pencegahan_dan_pemberantasan_tindak_pidana_pencucian_uang_dan_pendanaan_terorisme.html, diakses tanggal 30 Mei 2017.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan “*Report European FIU’s Study – Program 3-12 November 2004*”, Jakarta, Desember, 2004.
- Sjahdeini, Sutan Remy, “Money Laundering”, *Seminar Forensic Accounting, Money Laundering dan Efisiensi Kinerja Perusahaan*, Jakarta, Mei 2000.
- Susanto, Edy, “Bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hukum Indonesia”, <http://www.gresnews.com/berita/tips/70283-bentuk-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-hukum-di-indonesia/0/>, diakses tanggal 5 Maret 2017.
- Swantoro, Herry, “Pembatalan Akta Notaris oleh Hakim dalam Praktik Peradilan”, *Seminar Nasional Perlindungan Hukum Profesi Jabatan Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya*, Yogyakarta, 11 Februari, 2017.
- Tim Riset PPATK, “Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan”, *Penelitian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan*, Jakarta, 2015.
- Usman, Azhar, *Perlindungan Hukum dalam Penempatan Tenaga Kerja Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum Universitas Islam Jakarta, 2007.
- Zendrato, Darma S, “Pencucian Uang Aktif vs Pencucian Uang Pasif”, <https://darmasamadayazendrato.wordpress.com/2016/03/28/pencucian-uang-aktif-vs-pencucian-uang-pasif/>, diakses tanggal 5 Maret 2017.